

Senin, 20 Juni 2011

Pemkot Harus Terapkan E-Audit

Pontianak, BERKAT.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, H Arief Joni Prasetyo ST, mengatakan, dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan dan akuntabel, perlu disegerakan program e-audit atau audit elektronik.

Pasalnya, dengan e-audit dapat mempersingkat kerja auditor, baik dari auditor internal yaitu inspektorat maupun auditor eksternal yaitu BPK.

"Kami minta pemkot untuk mempercepat program e-audit atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," tegas Arief Joni Prasetyo, kepada BERKAT, kemarin.

Dengan e-audit tersebut, ini untuk mempersingkat kerja auditor. Bahkan Inspektorat dan BPK dapat segera melaksanakan tugasnya segera, setelah laporan pelaksanaan APBD diselesaikan. "Jadi, bulan Juli tahun berjalan sudah bisa diakses, kalau laporan sudah masuk web," terang Arief.

Selama ini, angkat politisi PKS ini, mereka hanya punya waktu dua bulan untuk memeriksa dokumen keuangan daerah. Disatu sisi, sebagian waktu



FOTO: MZPR

terpotong untuk mendatangi kantor serta menunggu dokumen.

"Dengan sistem ini, auditor tinggal melihat data yang sudah di unggah ke internet oleh auditee," ujar Arief.

Menurut dia, dengan sistem e-audit ini, tidak semua orang bisa melihat laporan keuangan. Karena harus terlebih dahulu memasukkan kata sandi khusus.

Dengan sistem berbasis web ini, lanjut dia, tentu aset seperti mobil dinas akan dapat diakses, melihat foto sampai salinan BPKB. "Auditor hanya akan datang dalam rangka pengujian lapangan," ujar dia.

” Dengan e-audit tersebut, ini untuk mempersingkat kerja auditor. Bahkan Inspektorat dan BPK dapat segera melaksanakan tugasnya segera, setelah laporan pelaksanaan APBD diselesaikan ”

ARIEF JONI PRASETYO
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak

Penerapan e-audit ini, menurut Arief, peluang terjadinya kolusi diyakini berkurang drastis. Hal mendasar lagi, karena berkurangnya intensitas tatap muka antara auditor dan auditee.

"Apalagi melalui sistem ini, mekanisme pemeriksaan secara elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga-lembaga auditee," terang Arief. Bukan itu saja, data atau informasi dari auditee yang berbentuk file data komputer dan terhubung

langsung dengan jaringan internet.

Juga dapat diakses secara online dan anytime anywhere para auditor. "Yang jelas, manfaat lain e-audit adalah kerja lebih transparan dan lebih efisien. Juga meningkatkan akuntabilitas dokumen negara," papar dia.

Lesinggung hasil Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK-RI, Arief menjelaskan, ada beberapa rekomendasi penting, yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. "Ya, kita minta pemkot segera bentuk tim untuk menindaklanjuti hasil Panja LHP," tegas dia.

Atas dasar inilah, lanjut Arief, DPRD minta pemkot untuk memperbaiki manajemen keuangan dengan sungguh-sungguh, termasuk pengelolaan aset daerah.

DPRD juga mengamankan pemkot menindaklanjuti opini BPK agar lebih baik, yakni menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2011. "Untuk merealisasikan harapan itu, Walikota Pontianak harus mempersiapkan e-audit," tegas Arief mengingatkan. (mzr)